

SKRIPSI

KEPENTINGAN POLITIK AMERIKA SERIKAT ATAS KUDETA MILITER  
MYANMAR PADA TAHUN 2021

MUH. ALDI

F01 17 017



PROGRAM STUDI ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK DAN HUKUM

UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

2024

**HALAMAN PENGESAHAN**

JUDUL : KEPENTINGAN POLITIK AMERIKA SERIKAT ATAS  
KUDETA MILITER MYANMAR PADA TAHUN 2021

NAMA : MUH. ALDI

NIM : F0117017

PROGRAM STUDI : ILMU POLITIK


Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan guna memenuhi persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik (S1).


Majene, 5 Juli 2024

Telah Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. Muhammad Sulthan, M.Si  
NIP: 19103282006041001

  
Zainuddin Losi, S.IP, M.Litt  
NIDN: 0022037902

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik dan Hukum



Dr.H. Burhanuddin, M.Si  
NIP: 196209101989031004

**SKRIPSI**

**KEPENTINGAN POLITIK AMERIKA SERIKAT ATAS KUDETA  
MILITER MYANMAR PADA TAHUN 2021**



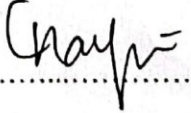
Dipersiapkan dan disusun oleh :

**MUH. ALDI**


**F0117017**

Telah diujikan di depan Dewan Penguji

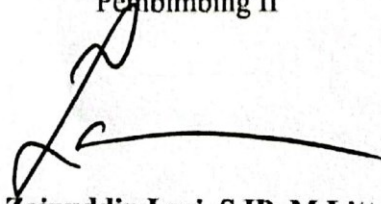
Pada Tanggal 05 Juli 2024 dan dinyatakan **LULUS**

<b>Nama Penguji</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>
1. Dr. H. Burhanuddin, M.Si.	Ketua Penguji	 (.....)
2. Asriani, S.IP, M.Si.	Penguji Utama	 (.....)
3. Citra N Fariaty, S.IP., M.Si	Penguji/Anggota	 (.....)

Pembimbing I

  
**Dr. Muhammad Sulthan, M.Si**  
NIP: 19103282006041001

Pembimbing II

  
**Zainuddin Losi, S.IP, M.Litt**  
NIDN: 0022037902

## ABSTRAK

*Myanmar kembali dilanda konflik pemerintahan. Terhitung sejak februari 2021 pemerintahan myanmar diambil alih oleh Junta Militer melalui Kudeta Militer terhadap pemerintah. Hal tersebut mengundang perhatian dunia sehingga menjadi isu politik internasional. Amerika Serikat sebagai Negara yang menjunjung tinggi nilai demokrasi muncul sebagai pihak yang paling keras dalam menolak kudeta yang dilakukan militer Myanmar. Oleh sebab itu, peneliti akan meneliti peran Amerika Serikat atas Kudeta Militer di Myanmar. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif atau library research (penelitian pustaka). Dengan buku "Strategi Politik" karya Peter Schroder sebagai referensi utama penelitian ini. Dengan penulis menggunakan konsep politik internasional serta konsep strategi politik untuk menganalisa dan mengetahui peranan dan strategi politik Amerika Serikat atas kudeta militer Myanmar. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa dalam upaya merespon kudeta Militer Myanmar, Amerika Serikat menggunakan strategi politik defect dan strategi cooperate. Reaksi Amerika Serikat tersebut disertai pula dengan beberapa kepentingan yang ingin dicapai. Dimana hal-hal tersebut dituangkan dalam hasil penelitian.*

Kata Kunci : Kepentingan, Strategi Politik, Kudeta Militer, Myanmar, dan Amerika Serikat.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Dalam menjalankan suatu pemerintahan, tiap negara memiliki sistem politik yang menjadi landasan dan tujuan bagi tindakan yang dilakukan oleh pemerintahan terhadap fungsionalitas dan kehidupan dari negara tersebut. Dengan adanya sistem pemerintahan yang berjalan sesuai dengan konstitusi yang berlaku di negara tersebut, maka warga negara akan memiliki aturan dan hukum yang berlaku. Sistem politik juga menjadi cerminan budaya politik (*political culture*) dari suatu negara yang terdiri dari pandangan hidup, norma, dan pola-pola orientasi pada politik serta dipengaruhi oleh sejarah, status sosial, agama, konsep mengenai kekuasaan, kepemimpinan dan sebagainya.<sup>1</sup>

Sistem politik atau pemerintahan negara dapat terbagi dalam beberapa jenis, baik berbentuk demokrasi presidensial, demokrasi parlementer, otoritarian, dan sebagainya. Namun dalam suatu sistem pemerintahan, tidak hanya mengenai hubungan antara pemerintah dengan rakyat, tetapi juga adanya hubungan antara sipil dan militer. Dalam sistem demokrasi, Huntington menyatakan ada bentuk hubungan sipil-militer yang ideal yaitu “kontrol sipil obyektif” atas militer, di mana sipil memiliki supremasi atas militer tetapi memberikan profesionalisme militer

---

<sup>1</sup> Alunaza, H., & Toy, B. A. (2019). Pengaruh Militer Dalam Sistem Politik Myanmar Terhadap Diskriminasi Etnis Rohingya Pada Tahun 2017. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional* hal.28

untuk tetap independen terkait ruang lingkup militer. Terkait hubungan sipil-militer, Barany menyatakan bahwa “demokrasi tidak dapat dikonsolidasikan tanpa elit militer yang berkomitmen untuk pemerintahan demokratis dan taat kepada elit politik”. Pemikiran Barany menekankan bahwa diperlukan ketaatan dari pihak militer untuk tetap terfokus terhadap profesionalismenya agar elit politik dapat mengendalikan militer sebagai alat pertahanan dan keamanan negara.<sup>2</sup>

Namun bagaimana ketika militer yang seharusnya mendapat pengawasan dan berada dalam kendali pihak sipil justru berupaya melakukan kudeta ataupun berupaya berperan dalam politik dengan dalih untuk menjaga konstitusi negara agar tetap berjalan atau mungkin menilai pihak sipil dianggap tidak mampu dalam menjalankan pemerintahan nasional. Hal ini terjadi di negara Myanmar, dimana pada awal tahun 2021 Militer Myanmar melakukan kudeta terhadap pemerintah yang dimana kudeta tersebut dipimpin oleh Junta Militer Myanmar.

Kudeta merupakan suatu permasalahan internal dalam Negara yang menyangkut pergantian kekuasaan yang telah lama dan sering terjadi di berbagai Negara. Dalam sejarah perkembangan sistem pemerintahan Myanmar, sebelum menjalankan sistem pemerintahan secara demokratis di tahun 2013, Myanmar sebelumnya juga pernah dipimpin Militer setelah kudeta yang dilakukan oleh Militer Myanmar pada tahun 1962. Jadi

---

<sup>2</sup> Maung Aung Myoe, *Emerging Pattern Of Civil-Military Relations In Myanmar. Southeast Asian Affairs. 2017*. Disandur dari <https://www.researchgate.net>

dengan dengan kudeta yang terjadi pada tahun 2021 ini tercatat telah dua kali kudeta yang dilakukan oleh militer di Myanmar.

Dimana pada saat adanya peralihan kekuasaan kepada militer pada tahun 1962 tersebut, seluruh aspek kehidupan yang ada di Myanmar diambil alih oleh militer baik dari segi politik, pemerintahan dan ekonomi. Pendapat ini dikemukakan oleh Davis I. Steinberg yang menyebut Myanmar sebagai *the most monolithically military-controlled in the world*. Hal ini disebabkan kondisi pemerintahan Myanmar yang sangat dikendalikan oleh militer sejak tahun 1962.<sup>3</sup> Atas dasar tersebut banyak kalangan yang mengancam kudeta yang kembali dilakukan militer Myanmar pada awal tahun 2021 ini. Karena jangan sampai kondisi pada saat kekuasaan militer pertama (1962) dikhawatirkan terjadi lagi pada masa peralihan kekuasaan kepada militer yang terjadi pada tahun 2021 ini.

Militer dalam menjalankan pemerintahan pada 1962 dipimpin oleh junta militer. Junta militer saat itu dipimpin oleh Jenderal Ne Win yang membuat Myanmar cenderung menutup diri dari pihak asing sesuai dengan kebijakan isolasi yang diterapkannya. Pemerintah militer juga menerapkan ideologi sosialisme dengan istilah *Burmese Way to Socialism* sebagai dasar bagi sistem politik dan ekonomi. Selain itu, pemerintah hanya mengakui adanya satu partai politik yang bernama *Burmese Socialist Program Party (BSPP)* atau Partai Lenzin dengan mayoritas

---

<sup>3</sup> M. Adian Firas, "Prospek Demokrasi di Myanmar", *Jurnal Universitas Paramadina*, Vol.2 No.2 (2003) : hal 130-131

anggotanya adalah golongan militer serta menghapus semua partai oposisi yang ada di negaranya.<sup>4</sup>

Kendali penuh militer dalam politik juga terlihat pada pemilu yang dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 1990. Pemilu tersebut diadakan oleh pemerintah Myanmar untuk meredam aksi demonstrasi yang terjadi tahun 1988 dan untuk menanggapi surat terbuka yang disampaikan oleh Aung San Suu Kyi, tokoh demokratisasi Myanmar pada tanggal 15 Agustus 1988. Aung San Suu Kyi dan tokoh pro demokrasi lainnya lalu membentuk sebuah partai yang bernama National League for Democracy (NLD). Mereka melakukan kampanye untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat Myanmar yang juga menginginkan perubahan dalam sistem perpolitikan di negaranya. Hasilnya partai NLD memperoleh suara sebesar 80,82 persen dan menang mutlak atas partai State Law and Order Restoration Council (SLORC) pemerintah Junta militer. Pemerintah junta militer mengabaikan hasil pemilu dan malah melakukan penahanan terhadap Aung San Suu Kyi dan beberapa tokoh pro demokrasi lainnya. Mereka dianggap sebagai pemberontak dan penyebab dari ketidakstabilan politik yang terjadi di Myanmar.<sup>5</sup> Disini terlihat jelas bahwa pemerintah Myanmar yang saat itu dipimpin oleh Militer sangat otoriter dalam menjalankan sistem pemerintahan. Hal tersebut merugikan masyarakat

---

<sup>4</sup> Hnin Yi, *"The Political Role of the Military in Myanmar"* (Ritsumeikan Center for Asia Pacific Studies (RCAPS) Working Paper, Asia Pacific University, 17 Januari 2014), hal 10-11

<sup>5</sup> Rani Anggia Puspita, *"Peranan Aung San Suu Kyi dalam Memperjuangkan Demokrasi di Myanmar Tahun 1988-2012"*(Skripsi, Universitas Pendidikan Indonesia, 2013), hal 3-4



sipil dan seakan-akan tidak mempunyai kesempatan untuk berperan dalam pemerintahan.

Pengendalian penuh militer dalam segala aspek kehidupan yang banyak merugikan masyarakat, pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah junta militer dan penangkapan tokoh-tokoh pro demokrasi akibat pemilu tahun 1990 menimbulkan kemarahan dunia internasional. Banyak sanksi yang diberikan oleh dunia internasional sejak tahun 1998 kepada Myanmar. Sanksi tersebut misalnya berupa penghentian semua bantuan dan pinjaman kepada pemerintah Myanmar yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Embargo senjata dan ekonomi juga dilakukan oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa. Bahkan Uni Eropa melakukan isolasi politik melalui pelarangan pemberian visa terhadap pejabat-pejabat pemerintah Myanmar untuk melakukan kunjungan ke Uni Eropa.<sup>6</sup>

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan *Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)* juga melakukan tekanan melalui pendekatan diplomatik agar pemerintah Myanmar mau menyadari kekejaman yang telah mereka lakukan terhadap rakyatnya sehingga ingin membuka diri untuk menerapkan demokrasi di negaranya. ASEAN memulai dengan sebuah kebijakan yang bernama *constructive engagement* dan PBB melakukan kunjungan ke Myanmar yang diwakili oleh Profesor Sadako Ogata, seorang sarjana dan diplomat dari Jepang yang dikirim pada tahun

---

<sup>6</sup> Ravi Mirza Fitri, "Dukungan India terhadap Junta Militer Myanmar (2004-2009) : Kerjasama Ekonomi dan Rivalitas dengan China," *Jurnal Analisis Hubungan Internasional Universitas Airlangga*, Vol 3 No 1 : hal 530

1990 sebagai perwakilan Komisi Hak Asasi Manusia (HAM) PBB yang melakukan pendekatan diplomatik agar pemerintah Myanmar bersedia untuk lebih menghormati HAM dan memberikan kebebasan dasar bagi rakyatnya.<sup>7</sup>

Dunia internasional terkhusus Amerika Serikat menginginkan agar Myanmar merubah sistem pemerintahannya menuju pemerintahan demokratis. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa sistem demokrasi dianggap sebagai sistem yang paling baik dan merupakan solusi terbaik bagi sistem sosial dan politik yang ada di dalam masyarakat karena meletakkan rakyat sebagai komponen penting dalam proses dan praktek-praktek demokrasi.<sup>8</sup>

Akhirnya setelah desakan dari pihak internal maupun eksternal pemerintahan militer Myanmar mulai melumat. Setelah diperintah lebih dari 40 tahun oleh militer, pemerintah Myanmar akhirnya mengungkapkan keinginannya untuk mulai menerapkan sistem demokrasi dalam negaranya melalui sebuah kebijakan yang bernama *Seven Steps Roadmap to Discipline-Flourishing Democracy*. Kebijakan ini merupakan salah satu program politik yang disampaikan oleh Perdana Menteri Khin Nyut pada pertemuan di gedung Pyithu Hluttaw pada tanggal 30 Agustus 2003.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Anna Magnusson and Morten B. Pedersen, *A Good Office? Twenty Years of UN Mediation in Myanmar* (New York: International Peace Institute, 2012), hal 6

<sup>8</sup> Janelle M. Diller, *"The National Convention in Burma (Myanmar): An Impediment to the Restoration of Democracy,"* <http://www.ibiblio.org/obl/docs/LHR-Diller3.html>

<sup>9</sup> *The New Light of Myanmar*, "Prime Minister General Khin Nyunt clarifies future policies and programmes of State," <http://www.networkmyanmar.com/images/kn2003.pdf>

Selanjutnya Pemerintahan Junta militer kemudian mengumumkan referendum pada 2008, dan memutuskan akan kembali menggelar pemilu pada 2010, sebagian besar dipicu oleh tekanan Internasional. Pada pemilu tahun 2010, USDP memenangkan 75% suara dari seluruh kursi yang diperebutkan. Pemerintahan junta menyatakan pemilu tersebut menjadi tonggak transisi dari pemerintahan militer menuju pemerintahan sipil yang demokratis, meskipun banyak yang menganggap bahwa perubahan ini tak banyak berarti, terutama terkait besarnya kekuasaan militer, mengingat orang-orang mereka masih duduk di tampuk kepemimpinan.<sup>10</sup> Namun hal ini menandai dimulainya era demokrasi pada sistem pemerintahan Myanmar.

Menilik proses peralihan sistem pemerintahan dari pemerintahan yang dipimpin oleh militer menuju pemerintahan demokratis yang terjadi di Myanmar. Dapat disimpulkan bahwa dunia internasional dalam hal ini perpolitikan internasional memiliki andil besar terhadap perubahan tersebut. Dimana elit-elit Internasional baik itu negara-negara berpengaruh maupun organisasi internasional berperan dalam menekan pemerintahan militer Myanmar. Penekanan yang dimaksud berupa suatu kecaman atau sanksi terhadap Myanmar. Jadi dapat dipahami bahwa tekanan dari pihak internasional tentu saja memiliki pengaruh yang sangat kuat sehingga dapat mempengaruhi sistem pemerintahan Myanmar pada saat itu. Oleh karena itu, diharapkan peranan politik internasional khususnya peran

---

<sup>10</sup> <https://cnnindonesia.com/internasional/20151107084937-106-90042/jatuh-bangun-myanmar-menuju-pemilu-demokratis>

Amerika Serikat sebagai negara Adikuasa kembali dapat membantu permasalahan yang terjadi di Myanmar pada saat ini.

Setelah beberapa tahun dalam menjalankan pemerintahan demokratis di Myanmar, kudeta kembali dilakukan oleh Junta Militer Myanmar. Menjelang sidang perdana parlemen hasil pemilihan umum November 2020, militer Myanmar pimpinan Jenderal Min Aung Hlaing mengambil alih pemerintahan. Militer menangkap Penasihat Negara Aung San Suu Kyi, Presiden Win Mynt, serta sejumlah tokoh Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD). Myanmar yang belum lama memulai masa transisi menuju demokrasi, pada 1 Februari 2021 kembali dikuasai militer. Kudeta tersebut memicu unjuk rasa besar-besaran yang disertai mogok kerja di berbagai wilayah Myanmar. Berbagai elemen rakyat Myanmar turun ke jalan dan menyatakan penolakan atas kudeta.

Kudeta kembali terjadi disebabkan oleh kecurigaan adanya kecurangan dalam pemilu. Dimana Pihak angkatan bersenjata dalam hal ini pihak Militer yang mendukung oposisi, menuntut pemungutan ulang dan mengklaim bahwa ada penipuan dalam pemilu. Sementara itu, Komisi Pemilihan mengatakan tidak ada bukti yang mendukung klaim tersebut. Dikarenakan Komisisi Pemilihan menolak untuk melakukan pemungutan ulang sesuai keinginan pihak Militer, akhirnya kudeta pun kembali dilakukan oleh Militer dengan dalih pemerintah sipil tidak bekerja dengan baik. Militer mengatakan bahwa mereka bertindak sesuai hukum dan

konstitusional karena pemerintah menolak untuk menangani tuduhan kecurangan pemilihan, dimana partai Suu Kyi menang telak.

Hal tersebut memicu respon dari dunia internasional , termasuk pemerintah Amerika Serikat yang dimana Presiden Joe Biden mendorong agar pemerintah terpilih dipulihkan dan kudeta dibatalkan. Sementara itu, mengutip dari kantor berita Reuters, AS menyatakan menolak setiap upaya untuk mengubah hasil pemilihan terbaru atau mengubah transisi demokratis Myanmar dan akan mengambil tindakan terhadap mereka yang bertanggung jawab jika tidak menghentikan apa yang mereka lakukan. Kata juru bicara Gedung Putih Jen Psaki.<sup>11</sup>

Hal ini menimbulkan kecemasan bagi masyarakat dunia serta masyarakat Myanmar itu sendiri. Mengingat Myanmar yang sebelumnya juga pernah dipimpin oleh Militer mengalami pengalaman yang pahit di masa pemerintahan yang lalu tersebut. Tentu kekhawatiran terulangnya sistem pemerintahan tersebut membuat banyak pihak yang menyayangkan kudeta yang kembali dilakukan oleh Militer Myanmar. Sementara itu, pihak AS menyatakan selain merugikan masyarakat lokal kudeta tersebut juga melukai hakekat demokrasi, atas dasar itulah Amerika Serikat muncul sebagai negara yang paling gencar menolak atas kudeta tersebut.

Sama halnya dengan kudeta yang pertama, kudeta yang terjadi pada tahun 2021 ini tentu saja tak luput dari mata dunia internasional terutama Amerika Serikat . Dimana peranan Amerika Serikat menjadi sorotan bagi

---

<sup>11</sup><https://www.bbc.com/indonesia/dunia-55882233.amp>

masyarakat karena mengingat betapa besar peranan politik internasional mereka pada masa kudeta yang pertama. Dimana semenjak diumumkannya peralihan pemerintahan Myanmar yang kembali dipimpin oleh militer. Banyak Negara yang menyayangkan terjadinya kudeta tersebut, terutama negara-negara yang memiliki kerja sama bilateral dengan Myanmar. Terlebih lagi Amerika Serikat sebagai pelopor demokrasi, dimana Presiden AS Joe Biden menyatakan bahwa Amerika Serikat akan terus membela dan memperjuangkan demokrasi dimana pun ia diserang.

Hal tersebut akhirnya menjadi sesuatu yang menarik dan tentu saja menjadi sorotan Masyarakat. Bagaimana tidak, tekanan eksternal khususnya tekanan Amerika Serikat sebagai negara adikuasa tentu saja memiliki pengaruh dalam menentukan jalan pemerintahan suatu negara, terlebih lagi Myanmar yang sebelumnya pernah juga merubah sistem pemerintahan karena banyaknya tekanan dari pihak Internasional. Dengan ini timbul pertanyaan dibenak masyarakat terutama pengamat politik internasional, apakah reaksi atau respon dari dunia Internasional dalam hal ini Amerika Serikat kembali dapat mempengaruhi arah kebijakan politik atau sistem pemerintahan yang ada di Myanmar. Terutama tekanan dari pemerintah AS sebagai negara yang paling agresif dalam mempengaruhi pihak militer Myanmar untuk mengubah keputusannya. Tentu saja ini adalah hal yang menarik dan hanya waktu yang bisa menjawab hal tersebut.

Bagaimanapun respon atau strategi yang dilakukan oleh pihak Amerika Serikat untuk mempengaruhi pihak militer Myanmar, baik itu teguran atau bahkan sanksi diharapkan dapat menciptakan solusi yang terbaik sehingga tidak banyak merugikan masyarakat. Besar harapan agar permasalahan ini tidak sampai menimbulkan konflik dan kesenjangan di Myanmar itu sendiri. Dan tentu saja semoga kekhawatiran akan kembali terjadi kepemimpinan pemerintahan seperti masa pemerintahan militer pertama tidak terjadi. Semoga saja gejolak perpolitikan yang merugikan banyak pihak ini tidak berlangsung lama dan ditemukan solusi yang tepat secepatnya.

Mengingat pihak Militer Myanmar yang akhirnya melepas kekuasaan pada tahun 2011 karena banyaknya desakan eksternal dalam hal ini desakan Dunia Internasional terutama Amerika Serikat. Jadi diharapkan respon dari pihak Internasional terutama elit-elit Global. Hal inilah yang menjadi alasan penulis untuk membahas isu ini. Dimana seperti yang dijelaskan sebelumnya situasi yang terjadi di Myanmar ini menjadi hal yang menarik untuk dibahas karena peristiwa tersebut pernah terjadi sebelumnya. Jadi timbul pertanyaan apakah pihak militer Myanmar kembali tunduk terhadap tekanan pihak Internasional. Dimana yang menjadi isu menarik untuk kita bahas bagaimana respon dari Amerika Serikat . Hal apa saja yang akan dilakukan oleh pihak Amerika Serikat. Sehingga menurut penulis isu ini merupakan suatu hal yang menarik untuk dianalisa bersama.

Jadi berdasarkan latar belakang di atas, dalam penelitian ini Penulis akan lebih menganalisa bagaimana respon dari pihak Internasional yang memicu Kepentingan Politik dalam hal ini negara Amerika Serikat atas kudeta yang dilakukan oleh Militer Myanmar. Dengan dasar itulah penulis menulis sebuah penelitian yang akan dijadikan dalam bentuk Skripsi dengan judul “Kepentingan Politik Amerika atas Kudeta Militer Myanmar Pada Tahun 2021”. Oleh karena itu dalam penelitian ini Penulis merumuskan masalah sebagai berikut.

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut yaitu;

- A. Bagaimana Strategi Politik Amerika Serikat terhadap Myanmar atas kudeta yang dilakukan oleh militer Myanmar ?
- B. Rumusan masalah yang kedua, apa kepentingan Amerika Serikat atas Kudeta Militer di Myanmar?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui Kepentingan dan Strategi Politik Internasional Amerika Serikat terhadap Myanmar atas Kudeta yang dilakukan oleh Militer Myanmar. Serta untuk dapat menganalisa kepentingan Amerika Serikat atas respon terhadap kudeta tersebut.



#### 1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat sebagaimana yang diharapkan, adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

##### A. Manfaat Teoritis

Sebagai data tambahan bagi penelitian selanjutnya yang berkeinginan untuk mendalami permasalahan yang berkaitan dengan kudeta Militer khususnya yang terjadi di Myanmar pada tahun. Penelitian juga ini bermanfaat untuk memperkaya pengetahuan sekaligus referensi yang berkaitan dengan mengenai reaksi politik Amerika Serikat serta kepentingannya terhadap Kudeta Militer di Myanmar yang terjadi pada tahun 2021

##### B. Manfaat Praktis

Manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1). Serta Penelitian ini bermanfaat sebagai proses pembelajaran bagi penulis untuk menerapkan pengetahuan yang didapatkan dalam menganalisis Kepentingan Politik Amerika Serikat terhadap kudeta Militer Myanmar 2021.

#### 1.5 Sistematika Penulisan

Penyusunan dalam penulisan ini penulis akan membagi atas beberapa bab yang masing-masing terdiri atas beberapa sub-bab. Untuk sistematika pembahasan penulis akan menggambarkan sebagai berikut :

Bab pertama yaitu Pendahuluan yang terdiri atas beberapa sub bab: latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua menjelaskan mengenai tinjauan pustaka, di bab ini terbagi atas dua poin. Poin pertama penelitian terdahulu dan poin kedua landasan teori dan konsep. Dimana pada bab ini akan lebih fokus menjelaskan mengenai teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini serta tentu diakhir bab terdapat Kerangka Fikir.

Bab ketiga akan menguraikan metode penelitian dalam penelitian ini. Dimana terbagi dalam enam sub-bab yaitu, jenis penelitian, batasan penelitian, tingkat analisis dan unit analisis, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan teknik analisis data.

Bab Keempat merupakan bagian utama dalam penelitian ini. Karena dalam bab ini akan membahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini terbagi atas tiga sub-bab yaitu, Poin pertama akan mendeskripsikan objek penelitian dalam judul ini. Kedua akan membahas strategi politik Amerika Serikat atas kudeta militer di Myanmar. Dan untuk poin ketiga akan membahas mengenai kepentingan Amerika Serikat atas kudeta yang militer Myanmar.

Bab kelima merupakan penjelasan terakhir atau penutup pada pembahasan laporan penelitian yang berisi kesimpulan, saran, dan kritik. Dalam kesimpulan penulis akan memaparkan jawaban atas permasalahan pokok yang diajukan dalam rumusan masalah.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menemukan beberapa literatur yang berkaitan dan dianggap mampu menunjang penulisan skripsi.

##### 2.1.1 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kudeta Militer Terhadap Perdana Menteri Laisenia Qarase Di Negara Republik Fiji

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pembahasan ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati Maulidah (2013)<sup>12</sup>, dimana pada penelitian ini membahas mengenai apa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya Kudeta Militer terhadap Perdana Menteri Laisenia Qarase di Republik Fiji. Dalam penelitian ini dijelaskan gambaran mengenai penyebab terjadinya kudeta di Republik Fiji pada tahun 2006.

Selain itu pada penelitian ini dijelaskan juga mengenai kegagalan pemerintahan sipil dibawah kepemimpinan Perdana Menteri Laisenia Qarase yang akhirnya menjadi dasar terjadinya Kudeta. Pada dasarnya terdapat kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang peneliti buat dimana sama-sama membahas tentang Kudeta. Namun penelitian ini lebih fokus pada teori penyebab terjadinya Kudeta.

---

<sup>12</sup> Rahmawati Mauliddah. 2013. *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kudeta Militer Terhadap Perdana Menteri Laisenia Qarase Di Negara Republik Fiji*. Universitas Jember

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang penulis buat dapat dilihat dari isu yang dibahas yaitu mengenai kudeta militer yang terjadi di suatu negara. Namun perbedaannya penelitian ini lebih memfokuskan penyebab terjadinya kudeta, sedangkan penelitian yang penulis buat lebih menekankan kepada reaksi perpolitikan dunia terhadap peristiwa kudeta tersebut.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif atau studi kepustakaan (library research). Pengumpulan data lebih difokuskan pada informasi informasi atau kajian yang diperoleh dari buku, surat kabar elektronik, dan publikasi dari instansi-instansi terkait yang relevan dengan peristiwa dalam artikel ilmiah ini. Selain itu, data-data yang diperoleh berasal dari media internet sebagai penunjang informasi untuk keperluan analisis.

#### 2.1.2 Analisis Faktor dan Dampak Kudeta Militer Di Turki Tahun 2016

Penelitian kedua yang berkaitan dengan penelitian yang penulis buat adalah penelitian yang dibuat oleh Sri Kurnia Sari (2016).<sup>13</sup> Penelitian yang berupa skripsi ini membahas tentang faktor dan dampak Kudeta Militer di Turki pada tahun 2016. Penelitian ini lebih menganalisa tentang faktor terjadinya kudeta. Selanjutnya dalam penelitian ini menggambarkan mengenai dampak akibat dari Kudeta Militer Turki pada tahun 2016.

---

<sup>13</sup> Sri Kurnia Sari.2016. *ANALISIS FAKTOR DAN DAMPAK KUDETA MILITER DI TURKI TAHUN 2016*. Universitas Sumatera Utara

Terdapat kesamaan penelitian yang penulis buat dengan penelitian ini dimana membahas teori mengenai kudeta secara terperinci. Namun perbedaan terlihat pada penelitian ini yang membahas tentang kudeta yang terjadi di Turki pada tahun 2016. Sedangkan penelitian yang penulis bahas tentang Kudeta Militer Myanmar yang terjadi pada tahun 2021.

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu jenis penelitian yang meneliti suatu objek, kondisi, sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa tertentu.

### 2.1.3 Kebijakan luar negeri Republik Indonesia Terhadap Myanmar: studi kasus isu demokrasi di Myanmar<sup>14</sup>

Yang menjadi literatur berikutnya merupakan Thesis dari Taufan Dwi Putra, Universitas Indonesia. Dalam thesis ini, Taufan Dwi Putra memaparkan bagaimana dinamika yang terjadi dalam tatanan dunia internasional terutama dalam hal demokrasi dan Hak Asasi Manusia sangat mempengaruhi kebijakan yang diterapkan oleh suatu Negara baik secara internal maupun eksternal. Sebagaimana kebijakan luar negeri yang dikeluarkan oleh Indonesia terhadap permasalahan demokrasi yang saat ini tengah bergejolak di Negara Myanmar. Kebijakan ini sejalan dengan pembentukan komisi bersama antara kedua Negara dan merupakan bukti

---

<sup>14</sup> Dwi Putra, Taufan. *Kebijakan luar negeri Republik Indonesia terhadap Myanmar: studi kasus isu demokrasi di Myanmar*. Universitas Indonesia

konkrit akan adanya dukungan Indonesia terutama dalam membimbing Myanmar menjalani tahapan transisi dan perwujudan dari politik Indonesia yang bebas dan aktif serta sesuai dengan arah kebijakan Luar Negeri Indonesia yaitu dengan meningkatkan kualitas diplomasi Indonesia dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional.

Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang Penulis buat terdapat pada penggunaan teori kebijakan politik, khususnya kebijakan politik luar negeri (Politik Internasional). Dimana pada hal ini sama-sama menjelaskan mengenai reaksi politik yang diambil terhadap Myanmar. Untuk Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif atau studi kepustakaan (library research).

## 2.2 Kerangka Teori

### 2.2.1 Strategi Politik

#### A. Pengertian Strategi

Istilah strategi berasal dari bahasa Yunani *strategia* (*stratos* = militer dan *ag* = memimpin), yang artinya seni atau ilmu untuk menjadi seorang jenderal. Strategi bisa diartikan sebagai suatu rencana untuk pembagian dan penggunaan kekuatan militer dan material pada daerah - daerah tertentu untuk mencapai tujuan tindakan tertentu.<sup>15</sup>

Menurut buku Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tahun 2007, Strategi merujuk pada beberapa definisi sebagai berikut: (1) ilmu dan

---

<sup>15</sup> Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta : CV. Andi Offset, 2008), h.3.

seni menggunakan semua sumber daya bangsa-bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu di perang dan perdamaian; (2) ilmu dan seni memimpin bala tentara untuk menghadapi musuh dalam perang, untuk mendapatkan kondisi yang menguntungkan; (3) rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus; (4) tempat yang baik menurut siasat perang.<sup>16</sup>

Jadi berdasarkan berdasarkan definisi strategi menurut arti bahasa yang dijelaskan diatas maka dapat disimpulkan. Strategi adalah suatu perencanaan jangka panjang yang disusun untuk menghantarkan pada suatu pencapaian akan tujuan dan sasaran tertentu.

Strategi adalah ilmu tentang teknik atau taktik, cara atau kiat muslihat untuk mencapai tujuan yang diinginkan.<sup>17</sup> Politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam wilayah tertentu.<sup>18</sup> Jadi, strategi politik adalah ilmu tentang tehnik, taktik, cara, kiat yang dikelola oleh politisi atau pemerintah untuk mendapatkan dan mempertahankan sumber-sumber kekuasaan, merumuskan dan melaksanakan keputusan politik sesuai yang diinginkan.

Dengan kata lain strategi politik adalah strategi yang digunakan untuk merealisasikan cita-cita politik. Tanpa strategi politik perubahan

---

<sup>16</sup> <https://kbbi.lektur.id/strategi>

<sup>17</sup> Tim Prima Pena, *Kamus Ilmia Populer* (Surabaya:Gitamedia Press, 2006), Hal 448

<sup>18</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta : PT. Gramedia Widisuasarana, 1992), Hal 10

jangka panjang atau proyek-proyek besar sama sekali tidak dapat diwujudkan. Politisi yang baik berusaha merealisasikan rencana yang ambisius tanpa strategi, seringkali menjadi pihak yang bertanggung jawab dalam menciptakan kondisi sosial yang menyebabkan jutaan manusia menderita. Jadi penting bagi politisi untuk merencanakan sesuatu dengan strategi yang sesuai dengan permasalahan politik yang sedang terjadi.

## B. Jenis-jenis Strategi Politik

Politisi akan selalu dihadapkan pada berbagai kemungkinan kerjasama dengan pihak lain. Oleh karena itu, perlu mengenal sebelas strategi utama yang diperkenalkan oleh Peter Schroder yaitu strategi defect, strategi cooperate, strategi random, strategi per kind, strategi per nasty, strategi spite, strategi soft majority, strategi tit for tat, strategi mistrust, strategi prober, dan strategi pavlov.<sup>19</sup>

### a. Strategi Defect

Strategi "Defect" adalah menolak untuk bekerja sama dalam setiap langkah yang diambil. "Defect" merupakan sebuah strategi yang sangat sederhana, yang senantiasa menolak untuk bekerjasama secara buta namun sekaligus mengejar sasaran. Jelas terlihat bahwa "Defect" tidak dapat dikalahkan. Tidak ada strategi lain yang apabila dibandingkan secara langsung dapat mengumpulkan lebih banyak poin

---

<sup>19</sup> Peter Scrooder, *Strategi Politik* (Jakarta: FNS,2009), hal 11-13.



dibandingkan "Defect", karena lawan hanya dimungkinkan untuk memperoleh hasil bekerja sama atau tidak bekerja sama.

b. Strategi Cooperate

Strategi "Cooperate" adalah strategi yang menjelaskan bekerja sama dalam setiap langkah yang diambil. Strategi merupakan lawan dari strategi "Defect" dan memiliki sifat-sifat yang berlawanan. "Cooperate" tidak dapat menang karena ia hanya bisa mencapai beberapa poin atau tidak memperoleh poin, dimana dalam kasus ini poin yang diperoleh tidak dapat lebih banyak daripada poin lawan. Apabila lawan mau kerja sama, maka strategi ini tidak akan merugikan, namun karena strategi buta ini, "Cooperate" sangat mudah 'dimanfaatkan'.

c. Strategi Random

Strategi "Random" adalah strategi yang posisinya ditengah-tengah menerima atau menolak. Contohnya; lemparlah uang logam, undilah kalau dapat sisi A berarti Anda harus bekerja sama dan kalau dapat sisi sebaliknya. "Random" memainkan "Defect" atau "Cooperate" dengan probabilitas yang sama. Tidak ada strategi yang bertujuan melakukan kerjasama secara permanen dapat berhasil dengan menggunakan langkah "Random". Jadi, apabila strategi ini tidak dimainkan secara buta, ia tidak akan mudah bekerjasama. Dengan demikian, adalah mustahil untuk mencapai secara konsisten.

#### d. Strategi Per Kind

Strategi Per Kind adalah strategi yang menggunakan Bermainlah secara periodik (bekerja sama, menolak bekerja sama). Strategi ini dimaksudkan untuk membuai lawan agar merasa aman, lalu Anda menyerang, supaya Anda tetap mampu mengendalikannya. Dengan harapan bahwa ia akan menerima penolakan untuk bekerjasama dalam hal yang terjadi saat itu, untuk kemudian mau diajak bekerjasama kembali.

#### e. Strategi Per Nasty

Strategi Per Nasty adalah Bermainlah secara periodik (menolak bekerja sama, menolak bekerja sama, bekerja sama). Sama seperti strategi per kind, hanya polanya diubah. Strategi ini awalnya tidak menerima kerja sama dengan lawannya tetapi diakhirnya menerima kerjasama dengan pesaingnya.

#### f. Strategi Spite

Strategi "Spite" adalah Bekerja sama dalam langkah yang pertama, kemudian bekerja sama selama lawan belum menolak bekerja sama, setelah itu senantiasa menolak bekerja sama. Ini adalah strategi pertama yang mempertimbangkan respon lawan. Strategi ini adalah strategi yang bersahabat yang menawarkan kooperasi, tetapi kemudian segera mengubah sikapnya ketika lawan tidak lagi kooperatif. Strategi ini dapat dideskripsikan dengan kata "Cooperate", dengan mekanisme pertahanan untuk mencegah terjadinya eksploitasi atau pemanfaatan.

Namun "Spite" tidak berusaha untuk mencapai pesaingnya. Ada variasi "Spite" dimana perubahan sikap baru diambil setelah lawan melakukan dua atau lebih upaya penipuan.

g. Strategi Soft Majority

Artinya mainkan langkah yang paling sering digunakan oleh lawan, dan apabila langkah yang diambil serupa, bekerjasama. Strategi ini menggunakan melihat dan mengambil strategi yang digunakan lawannya setelah itu digunakan dan ditambahi dengan strategi yang lebih baik untuk memenangkan.

Strategi ini berusaha menghindari pemanfaatan yang terus menerus, dengan cara merespon tindakan lawan yang cenderung tidak mau bekerjasama, antara lain dengan terang-terangan menolak kerjasama. Langkah ini memiliki keuntungan dengan diteruskannya kerjasama dengan pihak lawan yang siap untuk bekerjasama. Tapi kerugiannya adalah bahwa kita cenderung mudah ditipu, misalnya melalui "Per nasty".

h. Strategi Tit For Tat

Strategi "Tit For Tat" adalah Bekerjasama dalam langkah yang pertama dan dalam setiap langkah berikutnya, mainkan langkah yang dipergunakan lawan terakhir kali.

Strategi ini adalah salah satu yang mau bekerjasama tetapi bertahan dengan melawan usaha-usaha pemanfaatan yang dilakukan lawan. Pada saat yang sama, strategi ini tidak bersifat mendendam melainkan

menjawab kesediaan bekerjasama kembali jika ada tawaran untuk bekerjasama lagi. "Tit For Tat" tidak dapat menang karena tidak pernah menolak kerjasama tanpa motivasi, dan dengan demikian tidak pernah berusaha mencapai poin yang unggul. Di pihak lain, strategi ini juga tidak dapat ketinggalan lebih dari poin yang unggul, karena ia hanya membiarkan dirinya dimanfaatkan satu kali saja.

i. Strategi Mistrust

Strategi "Mistrust" adalah Menolak bekerjasama dalam langkah yang pertama, kemudian mainkan sama halnya dengan strategi "tit for tat". "Mistrust" sama sekali tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena strategi ini sejak awal sudah menolak untuk bekerjasama. Oleh karena itu, bergantung pada inisiatif lawan untuk memulai sebuah kerjasama. Seterusnya sama dengan "Tit For Tat".

j. Strategi Prober

Strategi "Prober" adalah Mainkan tiga langkah awal (bekerja sama, bekerja sama, menolak bekerja sama), kemudian menolak bekerja sama dalam setiap langkah berikutnya, apabila lawan bekerjasama dalam langkah kedua dan ketiga.

Di sini strategi lawan akan diuji terlebih dahulu. Jika strategi lawan membiarkan dirinya untuk dimanfaatkan, "Prober" mengambil langkah lebih lanjut untuk menolak bekerjasama. Langkah ini akan mengarahkan pada suatu sikap dasar yang agresif, yang bagaimanapun akan berubah menjadi sikap yang kooperatif. Apabila lawan tampil

lebih cerdas ("Tit For Tat"), karena jika tidak, hanya poin sedikit saja yang dapat diperoleh.

k. Strategi Pavlov

Strategi "Pavlov" adalah Bekerja sama hanya dalam langkah pertama, setelah itu hanya apabila kedua pemain mengambil langkah yang sama. "Pavlov" memiliki dasar pemikiran yang sama seperti "Tit For Tat", tetapi memiliki tuntutan yang lebih tinggi terhadap kesediaan diri sendiri untuk bekerjasama. Hanya jika kerjasama yang telah dilakukan berhasil, maka akan dilakukan kerjasama lebih lanjut. Ini berarti, jika ada upaya pemanfaatan yang dilakukan lawan, strategi akan bereaksi dengan tidak mau bekerjasama, dan selanjutnya tidak akan melakukan upaya untuk kembali bekerjasama.

Berdasarkan jenis-jenis strategi yang dijelaskan diatas politisi atau pemerintah harus lebih pandai mengembangkan alternatif, tidak pendek pikir atau cepat menyerah. Dan dari beberapa jenis strategi tersebut akan menjadi rujukan untuk menganalisis bagaimana strategi politik Amerika dalam menanggapi Kudeta yang terjadi di Myanmar pada tahun 2021 ini.

## 2.2.2 Politik Internasional

Didalam hubungan Internasional salah satu yang menjadi pokok kajian adalah politik internasional, dimana memperjuangkan segala bentuk kepentingan dan kekuasaan. Pada hubungan Internasional orang hanya

menyaksikan berbagai macam interaksi antar negara dalam masyarakat Internasional, sedangkan dalam politik internasional bertalian dengan masalah interaksi karena adanya tindakan suatu negara serta reaksi atau respon dari Negara lain.

Politik internasional dan hubungan internasional secara istilah itu sama, tetapi secara teoritis terdapat perbedaan. Politik internasional membahas tentang keadaan soal-soal politik ini di masyarakat internasional dalam arti yang sempit yaitu berpokok atau bertitik tolak pada diplomasi dan hubungan antar negara dan kesatuan-kesatuan politik lainnya. Sedangkan hubungan internasional adalah suatu istilah yang mencakup totalitas hubungan-hubungan dikalangan bangsa-bangsa dan kelompok masyarakat dunia.

Lebih jauh politik Internasional meliputi pola-pola tindakan suatu negara serta reaksi atau respon oleh negara lain. Politik internasional memberikan perhatian terhadap sistem internasional, deterrence, dan perilaku para pembuat keputusan dalam situasi konflik antar negara. Dimana pada hakekatnya politik internasional adalah hubungan-hubungan, tindakan dan respon dalam bidang politik yang dilakukan oleh dua negara atau lebih. Politik Internasional juga diasumsikan sebagai arena dimana negara-negara melakukan *struggle for power* demi *survival* dan kejayaan masing-masing negara. sehingga politik internasional seringkali berkisar

pada persoalan konflik, persengketaan, atau perang, baik yang berskala kecil maupun global.<sup>20</sup>

Perlu dibedakan antara ruang lingkup hubungan internasional dan politik internasional. Ruang lingkup hubungan internasional meliputi hubungan atau interaksi antara negara-negara, termasuk non-negara, seperti ekonomi, pariwisata, perdagangan, dan lain-lain. Sedangkan ruang lingkup politik internasional terbatas pada permainan kekuasaan yang melibatkan negara berdaulat. Jadi, dalam hubungan internasional terdapat aktor negara dan bukan negara sedangkan dalam politik internasional pelakunya hanya negara.

Maka dari itu menurut K.J. Holsti Politik Internasional merupakan studi terhadap pola tindakan negara terhadap lingkungan eksternal sebagai reaksi atas respon negara lain. Selain mencakup unsur power, kepentingan dan tindakan, politik internasional juga mencakup perhatian terhadap sistem internasional dan perilaku para pembuat keputusan dalam situasi politik. Jadi politik internasional menggambarkan dua arah, menggambarkan reaksi dan respon bukan aksi.<sup>21</sup>

Dalam pengertian lain politik internasional merupakan suatu tindakan negara atau beberapa negara yang ditujukan pada suatu negara atau negara-negara lainnya dan sifatnya lebih ditekankan pada soal-soal

---

<sup>20</sup> <https://www.kompasiana.com/amp/marsyandafadlina4971/5d96db9e097f363fc8061db2/apasih-politik-internasional>

<sup>21</sup> Perwita dan Yani. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. 2005. Bandung. Remaja Rosdakarya. Hal 40

politik masyarakat internasional yang lahir sebagai reaksi dari politik luar negeri negara-negara tersebut.<sup>22</sup>

Politik internasional merupakan suatu proses interaksi yang berlangsung dalam suatu wadah atau lingkungan, atau suatu proses interaksi, interrelasi, dan interplay antar aktor dalam lingkungannya. Adapun faktor-faktor utama dalam lingkungan internasional dapat diklasifikasikan dalam tiga hal yaitu:

- Lingkungan fisik seperti lokasi geografis, sumber daya alam, dan teknologi suatu bangsa.
- Penyebaran sosial dan perilaku, yang didalamnya mengandung pengertian sebagai hasil pemikiran manusia sehingga menghasilkan budaya politik serta munculnya kelompok-kelompok elit tertentu.
- Timbulnya lembaga-lembaga politik dan ekonomi serta organisasi-organisasi internasional dan perantara-perantara ekonomi serta politik lainnya.

### 2.2.3 Kudeta

Kudeta sendiri menurut beberapa pihak secara umum adalah suatu cara penggulingan kekuasaan atau pengambilalihan kekuasaan secara paksa dari tangan penguasa dan dapat dilakukan oleh golongan tertentu baik militer atau tentara maupun sipil serta dilakukan secara keras karena

---

<sup>22</sup> Nasution, D. *Politik Internasional: Konsep dan Teori*.1991.Bandung.Erlangga.



ada unsur paksaan. Kata "kudeta" sebenarnya punya pengertian sebagai kegiatan yang dijalankan oleh pihak atau golongan yang sudah berkuasa dengan melemahkan atau menyingkirkan orang atau lembaga lain yang mengambil bagian dalam pemerintahan.<sup>23</sup>

a. Bentuk- Bentuk Penggulingan Kekuasaan

Adapun bentuk bentuk perebutan kekuasaan lainnya menurut Edward Luttwak antara lain:

- 1) Revolusi : Revolusi dilaksanakan paling tidak pada permulaan, oleh massa rakyat yang tidak terkoordinasi, dan tujuannya adalah perubahan struktur sosial dan politik, serta orang-orang yang memegang kepemimpinan. Istilah ini menjadi populer. Banyak kudeta yang memakai istilah ini karena adanya implikasi bahwa rakyatlah yang melakukannya (kehendak rakyat) dan bukannya segelintir konspirator yang melakukannya.
- 2) Perang Saudara : Perang saudara sebenarnya adalah pertempuran antara unsur-unsur angkatan bersenjata nasional yang menuju pergantian pemerintahan.
- 3) Putsch : Putsch ini terutama adalah fenomena yang terjadi pada saat perang atau pasca-perang. Putsch dilakukan oleh suatu badan formal didalam angkatan bersenjata dibawah pimpinan yang ditunjuk.

---

<sup>23</sup> "Ensiklopedi Populer Politik Pembangunan Pancasila, dari Kes sampai Par " dalam <http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/1997/04/09/0123.html>

- 4) Perang kemerdekaan, insurgensi, dan lain lain : Dalam konflik internal ini, tujuan dari pemrakarsa bukan merebut kekuasaan , melainkan mendirikan suatu struktur negara yang bersaing . Pendirian struktur negara ini dapat berbasis politis maupun etnik.<sup>24</sup>

b. Tipe-Tipe Kudeta

Nordlinger menaruh perhatiannya kepada kudeta sebagai bagian dari proses politik. Menurutnya, kudeta merupakan sebuah kunci bagi seorang perwira militer untuk dapat mengambil alih kekuasaan negara yang kemudian peristiwa kudeta itu disebut kudeta militer. Hal ini biasanya dilakukan berdasarkan keadaan negara yang situasinya memburuk dari sisi ekonomi dan politik, misalnya korupsi oleh pejabat negara, aktor-aktor separatisme, kenaikan tingkat inflasi, tingkat pengangguran yang naik, dll. Biasanya, kudeta militer ini digunakan ketika muncul ketidakpercayaan lagi terhadap pemerintah yang sedang berkuasa dan berlaku tidak taat.<sup>25</sup> Pada saat itulah, militer merasa perlu untuk dapat mengambil alih pada momentum politik.

---

<sup>24</sup> Lutwak, Edward. 2009. "*Kudeta : Teori dan Praktek Penggulingan kekuasaan*". Relief : jogjakarta, hal.28

<sup>25</sup> Eric A. Nordlinger. 1990 "*Militer dalam Politik : Kudeta dan Pemerintahan* " Rineka Cipta, Jakarta, Hal 94.

Samuel P. Huntington merumuskan tipe-tipe kudeta berdasarkan ciri-ciri partisipan dalam kudeta dan tujuannya ke dalam 3 (tiga) macam, sebagai berikut.<sup>26</sup>

1) Kudeta pengawal (guardian coup), yang bertujuan menggantikan tata kelola pemerintahan yang tidak efektif. Kudeta ini sesuai dengan tindakan para jenderal militer yang sangat berperan dalam peristiwa kudeta tersebut.

2) Kudeta terobosan (break through coup), yang dilancarkan oleh para pewira dan berupaya meruntuhkan hierarki militer menggunakan kekuatan sipil untuk mengabsahkan transisi kekuasaan.

3) Kudeta veto (veto coup), digunakan oleh militer untuk mencegah tindakan pemerintahan sipil yang menentang kepentingan militer.

#### c. Sebab-Sebab Kudeta

Beberapa kajian mengenai penyebab kudeta merumuskan sebab yang benar-benar mendekati akar kudeta yang sesungguhnya, sedangkan yang lain adalah mengenai kondisi-kondisi kemasyarakatan yang membuka peluang bagi munculnya kudeta. Moore, mengkategorikan

---

<sup>26</sup> Samuel P. Huntington. 1968. *Political Order in Changing Societies*, dalam Jhon T. Ishiyama dan Marijke Breuning. op. cit. Hal. 206.

sebab-sebab kudeta berdasarkan kondisi dengan memakai istilah kondisi akut dan kondisi kronik.<sup>27</sup> Berikut penjelasan dibawah ini.

#### 1) Penyebab kudeta akut

Di mana kudeta tersebut terjadi berdampingan dengan asal usul kudeta itu sendiri, dan dapat dilihat sebagai bagian dari proses yang secara langsung menimbulkan kudeta itu sendiri. Sebagai permisalan, peran ketidakpuasan militer (*grievances*) di dalam militer sebagai sumber keinginan menentang pemerintahan sipil. Sebab ini, juga memerhatikan peran poluaritas militer di mata publik. Semakin tinggi popularitas semakin besar godaan di kalangan militer untuk merebut kekuasaan.

Selain sebab-sebab militer, sebab domestik lainnya menciptakan hubungan logis dengan kemunculan kudeta. Krisis politik domestik sebagai pemicu kesempatan untuk melancarkan kudeta. Krisis politik ini mungkin bersifat konstitusional, ekonomi atau bahkan elektoral.

#### 2) Penyebab kudeta kronik

Ada beberapa faktor struktural dan institusional. Karakter ekonomi negara juga dapat memicu kudeta. Jika ekonomi ekspor negara bersifat monolitik (hanya dikuasai oleh entitas tertentu),

---

<sup>27</sup> Jhon T. Ishiyama dan Marijke Breuning. *21<sup>st</sup> Century Political Science Reference Handbook*. Hal 207-208.

secara hipotesis meningkatkan kemungkinan kudeta. Jika industri tunggal atau ekspornya cukup kuat atau berpengaruh. Maka pengendalian manajemen dari industri tersebut akan berperan penting dalam merebut kekuasaan negara.

Sebab lainnya adalah legitimasi rezim yang berkuasa dan kekuatan masyarakat sipil. Jika masyarakat sipil yang kuat, kudeta tampaknya kecil kemungkinan akan terjadi. Masyarakat sipil yang kuat hanya melahirkan sedikit orang-orang yang dibutuhkan untuk melakukan kudeta. Dan apabila masyarakat cukup kuat, upaya kudeta tidak akan mendapatkan dukungan yang cukup. Jika rezim berkuasa di pandang sebagai sah, kecil kemungkinan kudeta akan terjadi.

Adapun faktor historis yang menjadi penyebab kudeta, yakni kudeta sebelumnya. Kudeta sering menimbulkan kudeta lainnya. Alasannya adalah adanya kudeta mungkin merupakan indikator kondisi masyarakat yang mempromosikan munculnya kudeta. Faktor-faktor yang menjurus ke arah kudeta akan tetap bertahan dan memberikan kemungkinan bagi terjadinya kudeta selanjutnya.

#### d. Kudeta Militer

Secara singkatnya, kudeta adalah pergantian kekuasaan atau pemerintahan yang terjadi secara tiba-tiba. Syarat utamanya terjadi kudeta adalah memegang kendali atas semua atau sebagian Angkatan

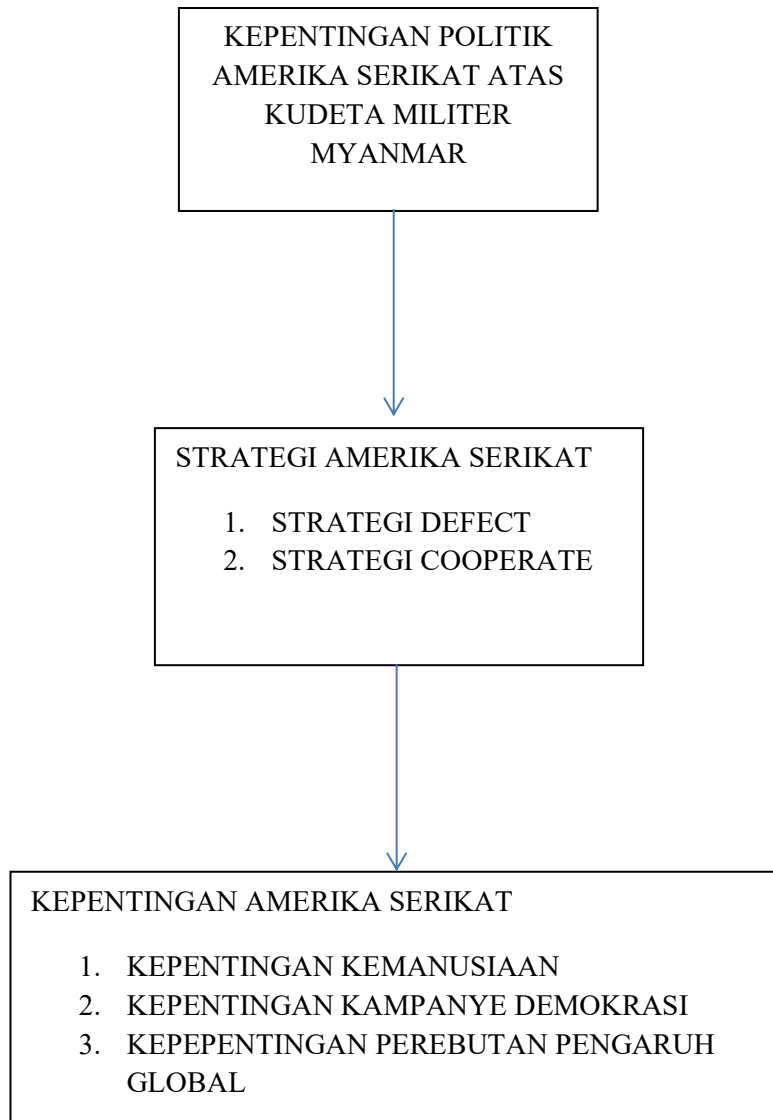
bersenjata, polisi, dan militer lainnya. Jadi, pengertian kudeta Militer adalah upaya perebutan kekuasaan pemerintah secara paksa yang dilakukan oleh pihak militer.<sup>28</sup>

Kegagalan dalam mempertahankan kestabilan dalam negeri biasanya membuat para perwira militer menjadi terdorong untuk melakukan campur tangan dan menjadikannya sebagai alasan untuk melakukan kudeta. Dengan adanya kudeta yang dilakukan oleh pihak militer yang berhasil menggulingkan pemerintahan yang berkuasa. Maka akan berdampak terhadap situasi politik yang terjadi, sebab dalam penggulingan kekuasaan tersebut tentunya melibatkan pemerintahan yang berkuasa sehingga mau tidak mau juga terkait dengan aspek politik yang ada.

---

<sup>28</sup> <https://www.suara.com/news/2021/02/03/095918/apa-itu-kudeta-militer-seperti-terjadi-di-myanmar?page=1>

### 2.3 Kerangka Fikir



## BAB III

### METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Maksud dari metode penelitian kualitatif yaitu metode yang digunakan peneliti yang tujuannya untuk memberikan gambaran tentang suatu masalah, gejala, fakta, peristiwa dan realita secara luas dan mendalam sehingga diperoleh pemahaman baru.<sup>29</sup>

#### 3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu jenis penelitian yang meneliti suatu objek, kondisi, sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa tertentu. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah membuat gambaran, penjelasan atau melukiskan secara sistematis mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar peristiwa dan fenomena-fenomena yang terjadi.<sup>30</sup> Penelitian ini juga merupakan jenis penelitian pustaka. Dimana dalam pengumpulan sumber datanya menggunakan cara *library research*, yaitu data didapatkan dari sumber kedua. Sumber kedua yang dimaksud disini misalnya adalah, buku, jurnal, majalah, internet, dan sejenisnya.

Disamping itu pendekatan yang peneliti pilih adalah pendekatan kualitatif deskriptif analisis, di mana tujuan dari penelitian kualitatif

---

<sup>29</sup> Conny R Semiawan. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grafindo. Hal 67.

<sup>30</sup> Moh Nazir. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hal 63.



deskriptif adalah untuk menghasilkan sebuah kesimpulan yang komprehensif mengenai kejadian spesifik yang dialami oleh individu maupun suatu kelompok<sup>31</sup>.

### 3.2 Batasan Penelitian

Guna mengidentifikasi dan memberikan analisa yang lebih mendalam, penelitian ini akan dibatasi pada peranan Strategi dan Kepentingan Politik Amerika atas Kudeta Militer di Myanmar. Dalam memfokuskan penelitian ini penulis juga memberikan batasan waktu yaitu pada tahun 2021. Hal ini didasari kejadian Kudeta Militer Myanmar yang terjadi pada tahun 2021. Sehingga memicu konflik dan menjadi perhatian masyarakat secara global. Dengan ini penting untuk melihat peranan Strategi dan Kepentingan Politik Amerika Serikat terhadap Myanmar.

### 3.3 Tingkat Analisis dan Unit Analisis

Sebelum menentukan tingkat analisis dalam suatu penelitian terlebih dahulu perlu dilakukan penetapan terhadap unit analisis dan unit ekplanasi. Unit analisis adalah unit yang perilakunya hendak dideskripsikan, dijelaskan dan diramalkan. Sedangkan unit ekplanasi adalah unit yang mempengaruhi perilaku unit analisa yang akan digunakan.<sup>32</sup> Unit analisis dalam penelitian ini adalah negara yaitu Myanmar sedangkan unit ekplanasinya adalah strategi politik Amerika

---

<sup>31</sup> Vickie A. Lambert and Clinton E. Lambert, *Qualitative Descriptive Research : An Acceptable Design*, 2.

<sup>32</sup> Mochtar Mas'oeed, *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi*, (Jakarta : LP3ES, 1990), hal 35-39

Serikat atas kudeta militer di Myanmar. Selanjutnya tingkat analisis merupakan level dimana unit analisis akan dianalisis.<sup>33</sup> Pada penelitian ini tingkat analisa yang digunakan adalah pada tingkat sistem politik internasional.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa sesuatu yang diketahui atau yang dianggap/anggapan. Ataupun suatu fakta yang digambarkan lewat angka, simbol, kode dan lain-lain. Teknik pengumpulan data adalah bagian instrumen pengumpulan data yang menentukan berhasil atau tidak suatu penelitian. Data perlu dikelompokkan terlebih dahulu sebelum digunakan dalam proses analisis. Pengelompokan data disesuaikan dengan karakteristik yang menyertainya. Berdasarkan pada posisi dan peran data dalam proses penelitiannya, data dibedakan atas 2 (dua) yaitu data primer dan data sekunder.<sup>34</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua. Data sekunder dimaknai sebagai data yang tidak diperoleh dari sumber pertama. Dalam hal ini, peneliti berada dalam posisi bukan orang pertama yang mengumpulkan data. Peneliti memanfaatkan data yang telah dikumpulkan pihak lain. Berikut ini kategori data sekunder yaitu:<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Ibid

<sup>34</sup> Iqbal Hasan. 2009. *Analisis Data Penelitian dengan Statistika*. Jakarta : PT Bumi Aksara. Hal 19.

<sup>35</sup> Burhan Bungin. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga University Press. Hal 128.

## 1. Data Internal

Data internal yaitu data yang tertulis pada sumber data sekunder. Seperti studi pustaka (library reasearch) dari berbagai literatur terkait. Data sekunder juga akan diperoleh melalui buku, internet dan jurnal-jurnal penelitian nasional maupun internasional yang berkaitan dengan penelitian.

## 2. Data Eksternal

Data eksternal yaitu data yang diperoleh dari sumber luar. Seperti data yang diperoleh dari badan atau lembaga yang aktivitasnya mengumpulkan data atau keterangan yang relevan dengan berbagai masalah dalam penelitian.

Lebih lanjut, McCaston menyebutkan sumber data sekunder terdiri dari Government Documents (Dokumen Negara), Official Statistics (Statistik Resmi), Technical Reports (Laporan), Scholarly Journals (Jurnal), Review Articles (Artikel), Reference Books (Buku), Research Institutions (Lembaga Penelitian), Universities and Library Search Engines (Sumber Penelitian Universitas), Computerized Databases (Data Basis yang terkomputerisasi) dan The World Wide Web (internet).<sup>36</sup>

### 3.5 Teknik Pengolahan Data

Data-data sekunder yang dikumpulkan melalui library research ini kemudian dianalisis dengan menggunakan teori-teori atau konsep-konsep

---

<sup>36</sup> McCaston. 1997. Dalam Lorraine Andrews. 2012. *Classic Grounded Theory to Analyze Secondary Data: Reality and Reflections*. Jurnal The Grounded Theory Review. Volume 11, Issue 1.

yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini. Data-data atau informasi yang paling relevan dengan penelitian ini selanjutnya diolah melalui prosedur kualitatif yaitu menetapkan, megurangaikan dan mendokumentasikan alur sebab akibat dalam pengetahuan yang sedang dipelajari. Hal ini digunakan untuk menemukan dan menilai ide-ide atau makna-makna yang terkandung di dalam data-data yang tersedia agar dapat mendukung pengetahuan yang sedang diteliti oleh penulis.

### 3.6 Teknik Analisis Data

Dalam penulisan ini penulis menggunakan teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yang membagi proses ini menjadi tiga tahap, yaitu:<sup>37</sup>

1. Proses reduksi data yang bertujuan untuk memilih, menggolongkan dan mengorganisasikan data. Data-data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber yang ada tersebut direduksi dengan menilai data-data mana saja yang diperlukan untuk mendukung penelitian ini dan data-data mana saja yang tidak relevan dengan konteks dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini.
2. Proses penyajian data. Dalam proses ini data-data yang telah dikumpulkan dianalisa menggunakan kerangka konseptual mengenai strategi politik internasional.

---

<sup>37</sup> Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008),hal 209-210

3. Proses penarikan kesimpulan dan verifikasi. Setelah pengaplikasian konsep maka diperoleh hasil penelitian yang kemudian diverifikasi kembali dengan pertanyaan penelitian, apakah berhasil menjawab pertanyaan tersebut atau tidak.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku :**

- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Rineka Cipta, 2008. hal. 209-210.
- Budiardjo, Mirriam. 1992. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1992. hal. 12.
- Edwark, Lutwak. 2009. *Kudeta : Teori dan Praktek Penggulingan Kekuasaan*. Yogyakarta : Relief, 2009. hal. 28-29
- Eric A. Nordlinger. 1990 "Militer dalam Politik : Kudeta dan Pemerintahan " Rineka Cipta, Jakarta, Hal 94.
- Hasan, Iqbal. 2009. *Analisis Data Penelitian dengan Statistika*. Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2009. hal. 19.
- Huntington, Samuel P. 1968. *Political Order in Changing Societies*. s.l. : 1968. hal. 206.
- Mas'ood, Mochtar. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi*. Jakarta : LP3ES, 1990. hal. 35-39.
- Nasution, Dahlan. 1991. *Politik Internasional : Konsep dan Teori*. Bandung : Erlangga, 1991.
- Nazir, Moh. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988. hal. 63.
- Perwita dan Yani. 2005. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung : Remaja Rosdakarya, 2005. hal. 40.
- Scrooder, Peter. 2009. *Strategi Politik*. Jakarta : FNS, 2009. hal. 11-13.
- Semiawan, Conny R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Grafindo, 2010. hal. 67.
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : PT. Gramedia Widisusarana, 1992. hal. 10-11.
- Tim Prema Pena. 2006. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya : Gitamedia Press, 2006. hal. 488.

Tjiptono, Fandy. 2008. *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta : CV. Andi Offset, 2008. hal. 3.

\*

**Jurnal & Karya Ilmiah :**

Alunaza, H., & Toy, B. A. (2019). Pengaruh Militer Dalam Sistem Politik Myanmar Terhadap Diskriminasi Etnis Rohingya Pada Tahun 2017. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*

Fitri, Ravi Mirza. *Dukungan India terhadap Junta Militer Myanmar ( 2004-2009) \*Kerjasama Ekonomi dan Rivalitas dengan China*. s.l. : Universitas Airlangga, Vol. III, hal. 530. 1.

Firnas, M. Adian. 2003. *Prospek Demokrasi di Myanmar*. s.l. : Jurnal Universitas Paramadina, 2003, Vol. II, hal. 130-131. 2.

Hussein Saddam Eksistensi Amerika Serikat Sebagai Kekuatan Global [Jurnal]. - Jawa Timur : FISIP UPN. - Global & Policy : Vol. 1.

Inter-Pallimentary Council. 1997. *Universal Declaration on Democracy*. Kairo : Inter-Pallimentary Council, 1997, Vol. IV, hal. 13.

Ishiyama, Jhon T. dan Breuning, Marijke. 21st Century POLITICAL Science A Reference Handbook. hal. 207-208.

Lambert, Vicky A. dan Clinton E., Lambert. *Qualitive Descriptive Research : An Acceptable Design*. 2.

McCaston. 1997. *Dalam lorraine Andrews, 2012. Classic Grounded Theory to Analyze Secondary Data Reality and Reflections*. 1, s.l. : Jurnal The Grounded Theory Review, 1997, Vol. XI.

Magnusson, Anna dan Morten B., Pedersen. 2012. *A Good Office? Twenty Years of UN Mediation in Myanmar* . New York : International Peace Institute, 2012, hal. 6.

Mauliddah, Rahmawati. 2013. *Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kudeta Militer Terhadap Perdana Menteri Laisenia Qarase Di Negara Fiji*. Jember : Universitas Jember, 2013.

Puspita, Rani Anggita. 2013. *Peranan Aung San Syu Kyi dalam Memperjuangkan Demokrasi di Myanmar 1988-2012*. s.l. : Skripsi, Universitas Pendidikan Indonesia, 2013.

Pratama Dhyka Kurnia. Persepsi Amerika Serikat Terhadap Kuba Pada Masa Pemerintahan Fidel Castro dan Raul Castro [Buku]. - [s.l.] : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Sari, Sri Kurnia. 2016. *Analisis Faktor dan dampak Kudeta Militer di Turki Tahun 2016*. Sumatera Utara : Universitas Sumatera Utara, 2016.

Taufan, Dwi Putra. *Kebijakan Luar Negeri Republik Indonesia terhadap Myanmar: studi kasus isu demokrasi di Myanmar*. Jakarta : Universitas Indonesia.

Yi, Hnin. 2014. *The Political Role of the Military in Myanmar*. Militer Myanmar, s.l. : Asia Pacific University, 2014, hal. 10-11.

**Website :**

<https://cnnindonesia.com/internasional/20151107084937-106-90042/jatuh-bangun-myanmar-menuju-pemilu-demokratis> diakses tgl 28/08/21 jam 08:11

<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-55882233>.amp diakses tgl 04/09/21 jam 08:44

<https://www.suara.com/news/2021/02/03/095918/apa-itu-kudeta-militer-seperti-terjadi-di-myanmar?page=1> diakses tgl 25/08/22 jam 14:25

<https://kbbi.lektur.id/strategi> diakses tgl 25/08/22 jam 14:50

<https://www.kompasiana.com/amp/marsyandafadlina4971/5d96db9e097f363fc8061db2/apa-sih-politik-internasional> diakses pada tgl 04/09/22 jam 13:40

<https://ilmupengetahuanumum.com/profil-negara-myanmar-burma/> diakses pada tgl 04/04/2022 jam 14.04

<https://id.wikipedia.org/wiki/Myanmar> diakses pada tanggal 04/04/2023 jam 14:15

<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5657196/sistem-pemerintahan-myanmar-ibu-kota-dan-letak-geografisnya> diakses tgl 04/04/2023 jam 15: 00



<https://internasional.kompas.com/read/2021/11/25/120100670/politik-luar-negeri-amerika-serikat?page=all> diakses pada tgl 05/04/2023 jam 08:45

<https://dunia.tempo.co/read/1431803/amerika-sanksi-jenderal-myanmar-dan-bekukan-akses-keuangan-mereka/full&view=ok> diakses pada tgl 17/04/2023 jam 9:12

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20210305071801-4-227986/biden-mendidih-karena-myanmar-lempar-2-bom-sanksi-ke-junta> diakses pada tgl 17/04/2023 jam 12:10

<https://www.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-011365325/soal-kudeta-militer-di-myanmar-amerika-serikat-diminta-turun-tangan-dengan-cepat-dan-berisanksi?page=2> diakses pada tgl 18/04/2023 jam 14:00

<https://voi.id/berita/41716/korban-jiwa-terus-bertambah-menlu-as-serukan-perusahaan-global-putus-hubungan-dengan-militer-myanmar> diakses pada tgl 18/04/2022 jam 16:30

<https://voi.id/berita/52143/korban-tewas-hampir-800-orang-amerika-serikat-tambah-sanksi-untuk-rezim-militer-myanmar> diakses pada tgl 28/04/2023 jam 19:44

<https://voi.id/berita/97069/amerika-serikat-desak-singapura-bantu-pembatasan-akses-rezim-militer-myanmar-ke-dana-asing> diakses pada tgl 29/04/2023 jam 04:44

<https://voi.id/berita/41716/korban-jiwa-terus-bertambah-menlu-as-serukan-perusahaan-global-putus-hubungan-dengan-militer-myanmar> diakses pada tgl 29/04/2023 jam 05:50

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20211228092208-8-302533/ngeri-35-warga-tewas-dibakar-junta-militer-myanmar> diakses pada tgl 12/05/2023 jam 9:16

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20210506154656-4-243810/posisi-buat-tentara-lawan-junta-awas-myanmar-perang-saudara/2> diakses pada tgl 12/05/2023 jam 13:20

<https://news.detik.com/internasional/d-5953779/pbb-ungkap-china-rusia-terus-pasok-senjata-ke-junta-myanmar/2> diakses pada tgl 20/05/2023 jam 20:04

<https://www.aa.com.tr/id/dunia/pakar-persaingan-as-china-sebabkan-kudeta-di-myanmar/2132175> diakses pada tgl 23/05/2023 jam 23:44

Ensiklopedia Populer Politik Pembangunan Pancasila, dari Kes sampai Par. Diakses dari <http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/1997/04/09/0123.html> diakses tgl 24/08/22 jam 09.12

Janelle M. Diller, "The National Convention in Burma (Myanmar): An Impediment to the Restoration of Democracy," <http://www.ibiblio.org/obl/docs/LHR-Diller3.html> , diakses 25/08/22 jam 13:40

"Kronologi Dugaan Kudeta Militer Myanmar: Aung San Suu Kyi Ditahan" <https://tirto.id/f9P5> diakses pada tgl 24/04/2022 jam 14:44

Maung Aung Myoe, *Emerging Pattern Of Civil-Military Relations In Myanmar. Southeast Asian Affairs. 2017*. Diakses dari <https://www.researchgate.net> tgl 10/08/23 jam 01.11

The New Light of Myanmar, "Prime Minister General Khin Nyunt clarifies future policies and programmes of State," <http://www.networkmyanmar.com/images/kn2003.pdf> , diakses pada 24/08/ 23 jam 12:30

<https://www.aa.com.tr/id/dunia/pakar-persaingan-as-china-sebabkan-kudeta-di-myanmar/2132175> diakses pada 25/03/2024 jam 15.20

[Efek Kudeta Junta Militer, Mata Uang Myanmar Anjlok 60% Lebih \(cnbcindonesia.com\)](https://www.cnbcindonesia.com) diakses pada 25/03/2024 jam 16.50

<https://internasional.kompas.com/read/2021/11/25/140100970/standar-ganda-politik-luar-negeri-amerika-serikat?page=all> diakses pada 25/03/2024 jam 18:30